

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakanag	1
1.2.Rumusan Masalah	9
1.3.Tujuan Penelitian	9
1.4.Manfaat Penelitian	9
1.5.Metode Penelitian	10
1.5.1. Pendekatan Masalah	10
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	11
1.5.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.5.4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
1.6.Pertanggungjawaban Sistematika	12
BAB II PENGADILAN YANG BERWENANG MENYELESAIKAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PADA PERUSAHAAN PAILIT	
2.1 Karakteristik dan Batasan Kewenangan Mengadili Pengadilan Hubungan Industrial Dan Pengadilan Niaga	14
2.1.1. Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial	18
2.1.2. Kewenangan Pengadilan Niaga	33

2.2. Pengadilan yang Berwenang untuk Mengadili Tuntutan Pekerja/Buruh Terhadap Upah atau Uang Pesangon yang Tidak Dibayar Oleh Perusahaan Pailit	51
--	----

**BAB III UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN OLEH
PEKERJA/BURUH APABILA DIRUGIKAN DALAM
PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT**

3.1 Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit	57
3.2 Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam konteks Kepailitan	65
3.3 Kedudukan, hak pekerja/buruh yang di PHK dalam perusahaan pailit	69
3.4 Upaya hukum terhadap kekurangan pembayaran pesangin pekerja/buruh dari pemberesan harta pailit	73

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	79

DAFTAR BACAAN

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 7)